

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mendasar yang di hadapi setiap negara dalam kebijakan awal pembangunan ekonomi selain target mengejar pertumbuhan adalah aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi yang sering di lakukan atau sering di jadikan indikator kemajuan ekonomi, pada sebagian besar negara ternyata menyisakan persoalan di beberapa negara sedang berkembang tujuan tersebut kadang menjadi dilemma antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau terjadinya distribusi pendapatan dan persoalan kemiskinan.

Indonesia sebagai negara berkembang yang perhatian utamanya yaitu pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, yang keduanya dianggap sama pentingnya namun untuk diwujudkan secara bersamaan sangat sulit untuk dicapai, terlebih apabila hanya berfokus pada salah satunya saja pasti akan membuat sebuah *trade off* yang mengorbankan lainnya. Pembangunan ekonomi suatu negara bisa dikatakan membawa dampak positif atau bahkan negatif bagi sebuah negara, dampak yang sering terjadi yaitu ketimpangan antar wilayah atau antar daerah. Ketimpangan antar wilayah atau daerah ini sering terjadi dan memeberikan permasalahan serius terutama pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah lain.

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang dihadapi oleh berbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya suatu ketimpangan yang terjadi, serta solusi dari tingkat kesulitan yang dialami. Keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dibagi kedalam dua gambaran yakni distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif yaitu rasio total penghasilan yang diterima bermacam-macam kelompok penerima

penghasilan yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 40 persen penduduk yang menerima pendapatan rendah, 40 persen berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Sedangkan distribusi pendapatan yang mutlak adalah presentase total penduduk yang penghasilannya sampai pada suatu jenjang penghasilan tertentu dibawah itu (Sukirno, 2006).

Ukuran yang digunakan guna mengetahui ketidakmerataan pendapatan adalah koefisien gini atau indeks gini yang berkisar antara nol sampai dengan satu. Indeks gini sebesar nol menyatakan bahwa pemerataan sempurna dimana semua orang memiliki pendapatan hampir sama besarnya. Sedangkan indeks gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna (Hudiyanto, 2017).

Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah keadaan dimana distribusi penghasilan yang di terima oleh masyarakat yang kurang merata. Ketimpangan di tentukan dari tingkatan pembangunan juga berhubungan terhadap kediktatoran serta juga pemerintah yang tidak sukses menghargai *property rights*. Ketimpangan dalam distribusi penghasilan menunjukkan bila cuma dalam mayoritas masyarakat yang meliputi pegawai dan buruh Cuma menikmati sedikitnya dari penghasilan nasional. Persoalan yang perlu di atasi sebuah negara adalah dengan ketimpangan distribusi penghasilan sebab bisa berpengaruh terhadap perekonomian serta juga sosialnya.

Pembangunan di Indonesia yang di lakukan dengan berkesinambungan yang tujuannya agar menaikkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dalam pembangunan dijalankan supaya meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penggunaan potensi serta sumber daya yang tersedia. sesuai dengan pandangan islam terkait pembangunan ekonomi yang tertuang dalam ayat berikut:

Suarah Al-Hasyr Ayat 07:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu sekalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amatkeras hukumannya.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan harus merata, tidak hanya beredar diantara orang-orang yang kaya, namun juga untuk orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Menurut Sismosoemarto (2012) mengungkapkan bahwa akibat adanya masalah ini adalah munculnya kecemburuan sosial, ketegangan, dan terus memicu kesenjangan. Sehingga masyarakat mengalami frustrasi sosial yang kemudian berujung pada tindak kriminal atau kekerasan lainnya.

Adapun ketimpangan pendapatan regional merupakan ketimpangan perkembangan ekonomi antar berbagai daerah pada suatu wilayah yang kemudian menyebabkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah melihat pentingnya masalah Indeks Gini. Kemudian dibutuhkan pengkajian tentang faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap persoalan ketimpangan distribusi penghasilan di provinsi D.I Yogyakarta. Sehingga supaya tidak menimbulkan perbedaan ekonomi yang lebih parah, kemudian pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

pembangunan serta Pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian yang tidak sama, yakni pertumbuhan ekonomi yang merupakan proses peningkatan output perkapita yang selalu pada jangka Panjang, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah indikator kesuksesan pembangunan. sehingga semakin banyak pertumbuhan semakin tinggi pun pertumbuhan ekonomi umumnya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya walaupun ada indikator yang lain yakni distribusi penghasilan sementara pembangunan ekonomi merupakan upaya dalam menaikkan penghasilan perkapita melalui pengelolaan kekuatan ekonomi potensial sebagai ekonomi riil dengan investasi, pemakaian teknologi dan keterampilan, peningkatan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan keuangan yang lengkap dengan segala pendukungnya secara alami dapat menarik kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan menjadi magnet tersendiri untuk meningkatkan pembangunan dan aspek sosia (Tambunan, 2018).

Indikator yang umumnya di pergunakan menjadi Analisa pembangunan yang terjadi dalam daerah yaitu pertumbuhan ekonomi. Tidak sekedar memandang dari pertumbuhan ekonomi yang besar, indikator sosial juga menjadi indikator lain yang bisa memandang kesuksesan pembangunannya. Contohnya saat meningkatnya indeks pembangunan manusia di negara bisa melihat dari naiknya mutu pendidikanya, mudahnya untuk menemukan informasi dan Kesehatan pemerataan pembangunan pun bisa mempengaruhi seluruh masyarakat. Sehingga tiap-tiap wilayahnya dapat mengetahui sampai dimanakah pemerataan pembangunanya dan bisa mengetahui terhadap perselisihan distribusi penghasilan yang terdapat di daerah tersebut.berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Rahayu, (2018) dengan judul analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi jambi tahun 2013-2016. Hasil tersebut yaitu IPM,PDRB

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi jambi tahun 2013-2016 menggunakan analisis linear berganda dengan metode (*OLS*) *Ordinary Least Square*.

Tabel 1. 1

**PDRB DIY Atas Harga Konstan Menurut Lapangan
Usaha tahun 2010-2020**

Tahun	PDRB(Rupiah)
2010	64. 678. 968,20
2011	68. 049. 874,44
2012	71.702.449,18
2013	75.627.449,59
2014	79.536.081,75
2015	83.474.440,55
2016	87.687.926,63
2017	69.565.413,5
2018	72.391.519
2019	104.487.543.80
2020	101.679.600.20

Sumber: DIY Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta 2020.

Pada table PDRB provinsi D. I Yogyakarta menurut Harga Konstan 2010 berdasarkan lapangan usaha terjadi kenaikan tiap tahunnya. tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan angka yang makin naik maupun tinggi. Itu bisa di artikan bila perekonomian di provinsi DIY berjalan secara baik dan masyarakat yang berada di dalamnya bisa di katakana sejahtera atau mendapatkan kelayakan.

melalui Gerakan pembangunan yang di lakukan, ketimpangan dan distribusi penghasilan serta kemiskinan itu sebagai lingkaran dalam sebuah perselisihan yang cukup amat susah diatasi, Menurut BPS penduduk yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan dasar minimalnya di anggap pada kriteria penduduk miskin. Garis kemiskinan kebutuhan minimal 2.100 per kapita dan perhari dan di tambahnya pula terhadap kebutuhan dasar yaitu kebutuhan dasar selaku sandang, pangan, sekolah, transportasi serta kebutuhan dasar lainnya, maupun

pengeluaran mereka dibawah Rp 360.000 per bulannya. Indeks Gini di kabupaten/kota DIY tahun 2010-2020 bisa dilihat dalam table dibawah ini

Tabel 1. 2

Indeks Gini Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2020

Tahun	indeks gini	Keterangan
2010	0,41	ketimpangan sedang
2011	0,40	ketimpangan sedang
2012	0,43	ketimpangan sedang
2013	0,44	ketimpangan sedang
2014	0,42	ketimpangan sedang
2015	0,43	ketimpangan sedang
2016	0,42	ketimpangan sedang
2017	0,43	ketimpangan sedang
2018	0,44	ketimpangan sedang
2019	0,42	ketimpangan sedang
2020	0,43	ketimpangan sedang

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, 2020

jenjang ketimpangan penghasilan di provinsi DIY makin bertambah. Ketimpangan di DIY berada dalam kedudukan di atas angka nasional. menurut data yang sudah dirilis di BPS angka gini ratio provinsi DIY suda sampai 0,44, sementara dalam angka nasional yaitu 0,391.

Penelitian yang dilakukan oleh Valentiana dan ketut (2013) yang berjudul “*Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dan Alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan Distribusi Pendapatan*” dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan sebagai variabel dependen dan PAD, dana alokasi umum, dan belanja modal sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini adalah PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan.belanja modal negative terhadap ketimpangan distribusi penghasilan

Penelitian oleh Nurlaili 2016 dengan menggunakan data panel sebagai analisisnya Fixed Effect Model dengan judul “*Analisis factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi*

pendapatan di pulau jawa tahun 2007-2013” yang Ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen dan PDRB, tingkat pengangguran, serta populasi penduduk sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah PDRB per kapita, populasi penduduk, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Holifah (2015) yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia” dengan ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan industri sebagai variabel independen. Dengan hasil penelitian Pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak memiliki pengaruh signifikan, total penduduk serta industri memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Mengetahui dari terdapatnya pengaruh yang amat besar yang di timbulkan karena terdapatnya sebuah ketimpangan distribusi penghasilan, maka di butuhkan sebuah kajian tentang factor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap persoalan ketimpangan distribusi penghasilan di provinsi DIY. Sehingga supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah daerah khususnya perlu memberi perhatian pada factor-faktor yang dapat memiliki pengaruh dan juga memberi pengaruh terhadap ketimpangan penghasilan. Menurut penjelasan diatas kemudian penulis tertarik untuk mengakat judul sebuah penelitian ini mengenai “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan, rumusan masalah yang hendak dikaji pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta?

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) pada ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada ketimpangan disrtibusi pendapatan di D.I Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaruh Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) pada ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta.
3. Untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada ketimpangan disrtibusi pendapatan di D.I Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitiannya penulis atau mahasiswa memiliki harapan bisa memberi sejumlah manfaat pada semua pihak yang membaca serta berkaitan terhadap penetian ini. berikut manfaat yang di harapkan menurut hasil penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan ketimpangan distribusi pendapatan.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah provinsi DIY untuk menentukan langkah dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Manfaat praktis.

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemerintah DIY mengenai pengaruh PDRB, IPM dan PAD pada distribusi pendapatan di D.I Yogyakarta.
- b. Dapat membantu pemerintah DIY dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan agar lebih baik lagi kedepannya.